

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketimpangan pembangunan antardaerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah terutama pada era desentralisasi yang diterapkan di negara Indonesia. Pada sistem desentralisasi ini telah terjadi perubahan paradigma baru dalam hal pembangunan (Tang & Huhe, 2016). Sistem pemerintahan ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahan dan fungsi-fungsi tertentu sehingga berdampak kepada daerah untuk menggali segala potensi yang ada di wilayah administrasinya sebagai sumber pendapatan daerah guna melaksanakan pembangunan dan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Kuncoro, 2004).

Di dalam sistem pemerintahan desentralisasi, pengelolaan dan penggalian seluruh potensi lokal digunakan sebagai kekuatan ekonomi sebagai modal pembangunan (Yigitcanlar & Velibeyoglu, 2008). Sistem pemerintahan ini mengisyaratkan pengakuan keanekaragaman sumberdaya yang dimiliki daerah dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik lokal suatu daerah (Helmsing, 2002). Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan arah pembangunannya, namun di sisi lain pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam memecahkan permasalahan pembangunan di daerahnya.

Perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing daerah menyebabkan ketimpangan antar daerah. Akibat perbedaan tersebut, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Sehingga terdapat daerah yang dikatakan maju dan daerah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar daerah tersebut berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi ketimpangan antardaerah tersebut.

Konsep pengembangan ekonomi lokal menjadi konsep pengembangan ekonomi yang sesuai dengan sistem pemerintahan desentralisasi. Hal ini dikarenakan, pengembangan ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan yang berorientasi pada kegiatan ekonomi lokal serta menekankan pada kebijakan pembangunan lokal (*endogeneous development*) yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia lokal, institusi lokal dan sumber daya lokal (Coffey *et al.*, 1984). Orientasi ini menekankan pada prakarsa lokal (*local initiatives*) dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong peningkatan perluasan kegiatan ekonomi (Blakely, 1984).

Pengembangan ekonomi lokal dapat di definisikan sebagai kondisi terjalinnya kerja sama kolektif antara pemerintah, dunia usaha serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya merangsang dan menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan (Rahma, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut, pengembangan ekonomi lokal memiliki dua kata kunci yaitu pemanfaatan sumber daya lokal dan kerja sama antar semua aktor pembangunan.

Dalam pengembangan ekonomi lokal, keberadaan industri kecil menengah (IKM) atau usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting. Industri kecil menengah umumnya berkembang karena adanya semangat kewirausahaan lokal yang memanfaatkan sumber daya lokal terutama input bahan baku dan tenaga kerjanya (Rizal & Kastaman, 2012). Untuk itu, keberadaan industri kecil menengah dapat berpotensi sebagai penggerak tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal disuatu wilayah (Schumpeter (1961) dalam Coffey *et al.*, 1984). Keterbatasan skala usaha industri kecil menengah dapat dikembangkan melalui pemberdayaan kerja sama atau kemitraan usaha. Melalui kemitraan usaha, seluruh potensi ekonomi lokal dan aspek lain terutama dalam hal pemasaran dan pendanaan dapat dipadukan sehingga dapat menciptakan sinergitas pembangunan.

Salah satu sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pengelolaan sumber daya perikanan (Satria & Matsida, 2004). Sektor ini dapat dijadikan modal pembangunan daerah di era desentralisasi yang sudah diberlakukan sejak tahun 1999. Hal ini dikarenakan, secara geografis Indonesia

terletak diantara Benua Asia dan Australia serta diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, sehingga menjadikan wilayah perairan laut Indonesia sebagai perairan dengan produktifitas tinggi yang memiliki daya dukung alam yang kuat. Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan laut mencapai 5,8 juta km² yang menyimpan sumber daya hayati dan non hayati yang melimpah (Rafinus, 2014).

Sektor perikanan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian melalui pendapatan, suplai lapangan pekerjaan, pendapatan devisa, dan juga penyuplai protein hewani (Sumaila *et al.*, 2016). Mengingat besarnya potensi perikanan yang dimiliki, maka dapat dimungkinkan sektor perikanan dapat dijadikan modal pembangunan daerah guna mengurangi ketimpangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional dalam rangka mencerdaskan anak bangsa.

Ikan merupakan salah satu produk bahan pangan bernilai ekspor tinggi karena memiliki permintaan yang cukup tinggi. Mengingat sifat ikan yang mudah rusak dan tidak tahan lama yang berbanding lurus dengan peningkatan suhu (Yang *et al.*, 2016), maka untuk dapat memenuhi permintaan ikan secara berkelanjutan terutama permintaan dari luar wilayah diperlukan adanya penanganan/pengolahan produk hasil perikanan (Huda *et al.*, 2015). Selain pengolahan perikanan mengupayakan adanya pengawetan, pengolahan ikan juga mampu menambah nilai tambah dan membuka peluang usaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat karena memiliki rantai keterkaitan ekonomi yang tinggi (Fauzi, 2010). Industri pengolahan perikanan merupakan bagian dari sektor hilir mata rantai perikanan. Dimana sektor ini sangat diperlukan dan tidak bisa di pisahkan dari sektor hulu yaitu kegiatan penangkapan dan budidaya perikanan.

Industri perikanan nasional telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak tahun 2014. Dalam rangka percepatan pembangunan perikanan nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Kebijakan tersebut dikeluarkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan pelaku utama bidang kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan; meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan meningkatkan devisa negara.

Kebijakan tersebut ditujukan kepada pemangku kepentingan yang terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bersinergi dalam mempercepat pembangunan industri perikanan.

Industri strategis yang menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan visi pembangunan industri nasional yaitu mewujudkan negara Indonesia menjadi negara industri yang tangguh melalui pembangunan industri unggulan salah satunya dibidang industri pangan adalah industri perikanan. Sejalan dengan visi pembangunan industri nasional tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan pembangunan sektor industri sebagai *leading sector* yang di wujudkan dalam visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2035 yaitu terwujudnya industri Jawa Tengah yang berdaya saing dan berkesinambungan.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor penggerak perekonomian di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan kontribusi terbesar dalam struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan sektor industri pengolahan selalu positif setiap tahunnya, untuk itu sektor tersebut menjadi salah satu sektor yang menjadi sektor strategis untuk dikembangkan dan diprioritaskan. Berdasarkan data BPS tahun 2015 industri pengolahan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah adalah industri sektor makanan dan minuman, karena memiliki kontribusi terbesar dalam sektor industri pengolahan yaitu 65,83% (enam puluh lima koma delapan puluh tiga persen). Salah satu industri makanan dan minuman tersebut adalah industri pengolahan ikan. Dimana industri pengolahan ikan dapat dikembangkan di beberapa daerah kabupaten/kota yang secara geografis memiliki keunggulan komparatif perikanan dan kelautan antara lain Kabupaten Batang, Brebes, Cilacap, Demak, Kendal, Pati, Kota tegal, Kota Pekalongan, dan Rembang.

Salah satu wilayah yang menjadi prioritas pembangunan industri pengolahan ikan di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Pati. Dimana, secara geografis Kabupaten Pati bersebelahan dengan Laut Jawa di sepanjang wilayah sebelah utara dan timur, sehingga daerah ini memiliki potensi perikanan yang besar baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pada tahun 2015 Kabupaten Pati merupakan kabupaten yang memiliki produksi perikanan terbesar

di Provinsi Jawa Tengah. Potensi dan keunggulan komparatif ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dan modal pengembangan industri pengolahan perikanan yang didukung dengan demografi Kabupaten Pati sebagai sumber daya manusianya.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor terbesar dalam struktur ekonomi Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati. Sektor selanjutnya adalah sektor industri pengolahan yang menempati urutan kedua dan perdagangan besar dan eceran pada urutan ketiga. Ketiga sektor ini saling berkaitan karena pada umumnya sektor industri pengolahan memanfaatkan bahan baku dari bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor hulu. Sedangkan sektor hilir industri pengolahan adalah pemasaran produk industri pengolahan yang didukung oleh sektor perdagangan besar dan eceran.

Subsektor perikanan memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pertanian pangan yaitu 14,69% (empat belas koma enam puluh sembilan persen) pada tahun 2015 dalam struktur PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pati. Hal ini menunjukkan besarnya potensi perikanan di Kabupaten Pati dan produktifitasnya relatif meningkat setiap tahunnya. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030, Pemerintah Kabupaten Pati telah merencanakan pengembangan sektor perikanan dalam bentuk kawasan yang dikembangkan melalui pendekatan kawasan minapolitan. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tersebut terdiri atas perikanan tangkap, budidaya tambak, budidaya air tawar dan pengolahan ikan. Di bidang pengembangan pengolahan ikan, telah ditetapkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan yang meliputi Kecamatan Juwana, Batangan, Dukuhseti dan Wedarijaksa.

Peningkatan produksi serta peningkatan subsektor perikanan menunjukkan melimpahnya bahan baku perikanan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pengolahan perikanan. Dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Salah satunya melalui pengembangan industri pengolahan perikanan yang memanfaatkan sumber daya

perikanan dan kelautan sebagai bahan baku sekaligus memacu peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Pati

Industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati pada tahun 2015 relatif stagnan kuantitasnya dan tidak sebanding dengan peningkatan produksi perikanan dan kelautan. Untuk itulah diperlukan kajian pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati. Konsep pengembangan ekonomi lokal digunakan karena karakteristik industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati yang umumnya berbentuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Konsep pengembangan ekonomi lokal dipandang sesuai untuk mengatasi keterbatasan IKM/UMKM dalam hal ukuran usaha dalam menghadapi globalisasi dan regionalisasi (Rizal & Kastaman, 2012).

1.2. Rumusan Masalah

Salah satu kebijakan pembangunan yang dipandang tepat dan strategis dalam rangka pembangunan daerah, sekaligus mengantisipasi globalisasi dan perdagangan bebas adalah kebijakan pengembangan ekonomi lokal (Nel, 2015). Dalam era globalisasi suatu daerah tidak hanya menggantungkan diri dari keunggulan komparatif/keunggulan sumber daya alam dibandingkan daerah lain, melainkan daerah dituntut untuk mengembangkan keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dalam era perdagangan bebas (Tselios *et al.*, 2012). Kebijakan ekonomi lokal merupakan kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan kepada pengembangan sektor yang menjadi prioritas unggulan yang diusahakan dalam aktifitas ekonomi masyarakat lokal.

Pengembangan ekonomi lokal pada hakekatnya merupakan konsep pembangunan kewilayahan dimana pendekatan pembangunan berdasarkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang berfokus pada optimalisasi potensi ekonomi lokal yang terdesentralisasi (Rodríguez-pose, 2001). Berdasarkan pengertian tersebut telah terjadi perubahan paradigma pembangunan dimana konsep pembangunan klasik melalui pendekatan dari bawah dan dari atas telah berubah menjadi paradigma pembangunan ekonomi lokal dengan

pendekatan pembangunan kewilayahan dimana masyarakat dipandang sebagai salah satu inisiasi pembangunan.

Konsep pembangunan ekonomi lokal menjadi konsep yang penting dalam pembangunan daerah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi lokal dilaksanakan dalam era otonomi daerah dalam rangka mengembangkan potensi lokal agar dapat bertahan dan berkembang ditengah persaingan regional maupun global (Pike *et al.*, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi suatu wilayah lebih mengarah kepada pendekatan berorientasi pada pengembangan sumber daya lokal yang merupakan faktor endogen suatu wilayah secara optimal (Rossiter & Price, 2013).

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang memiliki kebijakan pembangunan daerah yang mendukung kebijakan pembangunan nasional yang *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment* dan keadilan untuk semua. Selain itu pembangunan daerah juga disinergikan dengan komitmen nasional pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk semua urusan yang berkaitan dengan target capaian SDGs. Salah satu target tersebut adalah pengurangan kemiskinan dan diwujudkan dalam kebijakan umum pembangunan daerah yaitu peningkatan pemanfaatan potensi, energi dan sumber daya mineral secara lestari. Kebijakan tersebut juga dipertajam dalam kebijakan strategis dan prioritas, salah satunya adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menumbuhkembangkan industri, perdagangan dan pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bupati terpilih lima tahun kedepan adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pariwisata dan perikanan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengintegrasikan ketiga program prioritas pembangunan tersebut adalah pengembangan industri pengolahan perikanan. Dimana industri pengolahan perikanan merupakan bagian hilir dari subsistem perikanan yang umumnya berskala UMKM. Sementara produk industri pengolahan perikanan dapat dijadikan daya dukung pariwisata dalam penyediaan produk unggulan sebagai oleh-oleh.

Salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Pati adalah bidang pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dalam struktur PDRB Kabupaten Pati serta sesuai dengan motto Kabupaten Pati yaitu Bumi Mina Tani, yang artinya suatu daerah/wilayah yang memiliki kekayaan di bidang pertanian dan perikanan. Keberadaan secara geografis Kabupaten Pati dimana sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah timur dan utara sehingga memiliki keunggulan komparatif baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Konsep pengembangan ekonomi lokal telah diterapkan di Kabupaten Pati dalam perencanaan pembangunan maupun pengembangan wilayah dalam sektor ekonomi. Dimana konsep tersebut direalisasikan untuk meningkatkan daya saing industri melalui pembentukan klaster industri melalui pendirian FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*) pada tahun 1998. Terdapat 12 (dua belas) klaster industri yang dikembangkan di Kabupaten Pati guna mendorong inovasi dalam menghadapi globalisasi dan regionalisasi. Adapun klaster tersebut adalah klaster konveksi, handycraft, buah-buahan, sutera alam, makanan ringan, bandeng air tawar, batik tulis bakaran, kapuk randu, kuningan, kopi, tapioka dan pengolahan hasil laut.

Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Pati telah dikembangkan dengan konsep pembangunan kawasan minapolitan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Pengembangan kawasan minapolitan tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati. Untuk mempercepat pembangunan sektor perikanan diperlukan perubahan sistem produksi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, yaitu melalui industrialisasi (Huda et al., 2015). Industri pengolahan ikan diharapkan dapat memperbaiki dan memacu kinerja sistem produksi, sehingga mampu memicu peningkatan produksi perikanan secara berkelanjutan serta mampu mencukupi kebutuhan permintaan domestik maupun ekspor.

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor basis dalam struktur perekonomian di Kabupaten Pati. Produksi perikanan di Kabupaten Pati tahun 2015 secara umum menempati urutan pertama di Provinsi Jawa Tengah. Dimana produksi perikanan tangkap menempati urutan kedua setelah Kabupaten Rembang dan perikanan budidaya menempati urutan kedua setelah Kabupaten Brebes. Namun dari keseluruhan total produksi tersebut baru sekitar 52,11 % (lima puluh dua koma sebelas persen) dari jumlah total produksi perikanan yang diolah, selebihnya dijual dalam bentuk mentah.

Peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Pati tidak sebanding dengan pengembangan industri pengolahan perikanan. Bahkan pada tahun 2015 telah terjadi penurunan kuantitas industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. Dimana pada tahun 2014 jumlah industri pengolahan perikanan sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) berkurang menjadi 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) pada tahun 2015. Industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati pada umumnya masih bersifat industri kecil menengah (IKM) atau bisa dikatakan sebagai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mengingat produksi perikanan yang relatif besar sangat memungkinkan adanya pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati dalam upaya pembangunan daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, selanjutnya memunculkan *Research Question (RQ)* “Bagaimana arahan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati?”

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati. Penelitian ini diharapkan mampu merumuskan alternatif strategi sebagai

arahan pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati berdasarkan kondisi dan fakta yang ada.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Dalam rangka pencapaian tujuan dari penelitian, maka terdapat beberapa sasaran dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi karakteristik industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati
2. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati.
3. Melakukan identifikasi kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati
4. Melakukan analisis arahan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis maupun secara praktis dalam mengembangkan industri pengolahan perikanan dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki kontribusi positif dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota. Hal tersebut dimungkinkan karena penelitian ini berupaya untuk menjelaskan mengenai perencanaan strategis dalam rangka pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal dalam rangka pengembangan wilayah dalam memanfaatkan sumber daya alam secara optimal di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Selain memberikan manfaat positif dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat positif bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Pati yaitu pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Pati dalam hal pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup materi adalah batasan penjelasan atas pokok/inti dari topik penelitian. Sedangkan ruang lingkup wilayah merupakan batasan wilayah/lokasi yang menjadi objek penelitian.

1.5.1. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan mengacu pada tujuan utama penelitian yaitu untuk melakukan kajian pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati, sehingga perlu dilakukan pembatasan substansi dan materi yang akan dibahas dalam penelitian. Pembatasan substansi dan materi pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi karakteristik industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati mencakup deskripsi dan pemahaman karakteristik industri pengolahan perikanan meliputi faktor bahan baku, sumber daya manusia, lokasi, infrastruktur, sarana prasarana, modal dan keuangan, budaya bisnis, identitas masyarakat, faktor fisik, pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, serta pasar dan pemasaran.
2. Analisis faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati mencakup analisis dan pembahasan mengenai variabel/faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati.

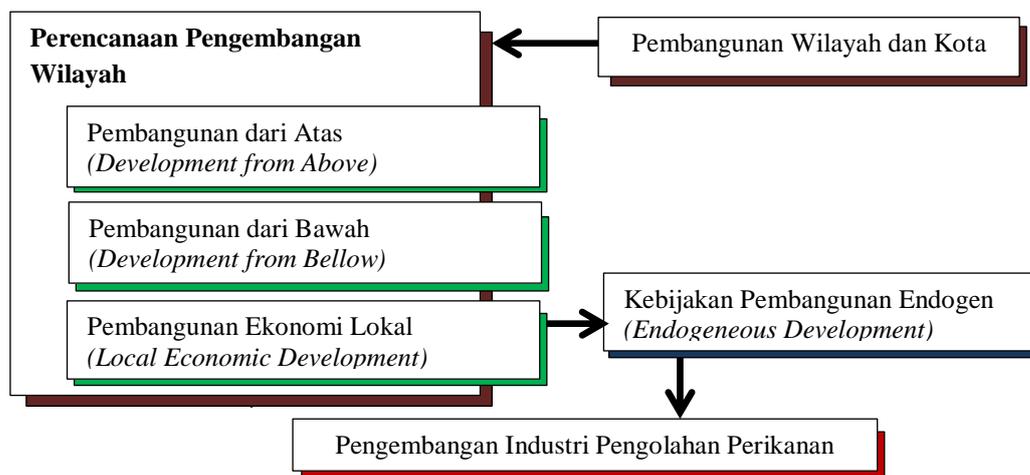
3. Identifikasi kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati meliputi pemahaman mengenai identifikasi pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati, pengelompokan pemangku kepentingan, identifikasi hubungan antar pemangku kepentingan, serta identifikasi pola kemitraan/kerja sama pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati.
4. Analisis arahan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal berdasarkan potensi dan permasalahan yang didapatkan dari hasil identifikasi karakteristik industri pengolahan perikanan, analisis faktor dan identifikasi kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati.

1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah mencakup wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati. Dimana kawasan minapolitan yang diperuntukkan sebagai kawasan industri pengolahan perikanan meliputi Kecamatan Juwana, Batangan, Wedarijaksa dan Dukuhseti. Sementara industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati terdapat di 17 kecamatan yaitu Kecamatan Juwana, Tayu, Batangan, Dukuhseti, Margoyoso, Wedarijaksa, Trangkil, Pati, Sukolilo, Kayen, Winong, Gabus, Jaken, Jakenan, Tambakromo, Gembong dan Margorejo. Hal ini disebabkan skala usaha industri pengolahan perikanan berbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana usaha UMKM dapat dikembangkan di seluruh kecamatan sesuai tata guna lahan yang tercantum di dalam Perda RTRW tersebut. Ruang lingkup wilayah penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1.1.

1.6. Keaslian Penelitian

Jika dilihat dari perspektif bidang ilmu Pembangunan Wilayah dan Kota, penelitian ini termasuk dalam kategori Perencanaan Pengembangan Wilayah. Secara garis besar dikenal tiga konsep utama dalam pengembangan wilayah, yaitu Konsep Pembangunan dari Atas, Konsep Pembangunan dari Bawah dan Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal banyak dikembangkan di negara berkembang seperti Indonesia. Pengembangan ekonomi lokal mengintegrasikan pengelolaan sumber daya secara optimal melalui kerja sama/kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Ciri utama dari pengembangan ekonomi lokal didasarkan pada kebijakan pembangunan endogen (*Endogenous Development*) menggunakan kekuatan lokal sumber daya manusia, kelembagaan dan fisik. Konsep inilah yang digunakan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. Posisi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.2.



Sumber : Analisis Penyusun, 2017

GAMBAR 1.2
DIAGRAM POSISI PENELITIAN DALAM BIDANG
ILMU PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA

Penelitian kajian pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan mengenai pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati

maupun di wilayah lain. Selanjutnya untuk membedakan dengan hasil penelitian lainnya serta untuk menghindari terjadinya plagiarisme, berikut penulis sajikan tabel I.1 keaslian penelitian yang dilakukan.

TABEL I.1
KEASLIAN PENELITIAN

Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Sistim pengembangan agroindustri perikanan laut: suatu kajian kelayakan dan strategi pengembangan di Provinsi Jawa Tengah (Giyatmi, 2005)	Mengkaji pengembangan agroindustri perikanan laut berbasis sistem penunjang keputusan	Kualitatif dan perancangan model AGRIPAL sebagai sistem penunjang keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agroindustri perikanan laut di Provinsi Jawa tengah dibagi kedalam tiga kawasan pengembangan. • Pengembangan agroindustri perikanan laut diprioritaskan memperkuat agroindustri • Unsur kunci pendorong pengembangan adalah pemerintah daerah dan pusat, nelayan, pengusaha
Strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis agribisnis perikanan di Kepulauan Aru (Utukaman, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun strategi dan merancang program pengembangan ekonomi lokal berbasis agribisnis di kabupaten Kepulauan Aru 	Deskriptif kualitatif dengan Analisis RALED dan AHP	Menurut aspek pembangunan berkelanjutan adalah mempertimbangkan keberadaan adat dan kelembagaan lokal. Aspek tata pemerintahan adalah reformasi sistim insentif pengembangan SDM aparatur, prosedur pelayanan administrasi publik, peran asosiasi industri terhadap perbaikan kebijakan pemerintah. Sedangkan Aspek proses manajemen adalah analisis stakeholder PEL dan analisis pemetaan potensi ekonomi
Strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis perikanan di kabupaten Kepulauan Aru (Dumgair, 2011)	Merumuskan strategi perencanaan pengembangan ekonomi lokal berbasis perikanan di kabupaten Kepulauan Aru	Kuantitatif dengan statistik deskriptif kuantitatif dan analisis AHP	Sektor perikanan merupakan sektor basis, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Prioritas pengembangannya adalah peningkatan kerjasama, aksesibilitas, infrastruktur, dan SDM
Kajian potensi pengembangan industri pengolahan ikan di Kota Palopo	Mengkaji potensi pengembangan industri pengolahan ikan	Kuantitatif dengan statistik deskriptif dan	Strategi pengembangan industri pengolahan ikan adalah pengembangan pengolah ikan, penambahan

Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Provinsi Sulawesi Selatan (Marwan, 2014)	di Kota Palopo	SWOT	infrastruktur pendukung pengolahan dan pemasaran produk pengolahan ikan, mempermudah administrasi dan peningkatan daya saing serta peningkatan volume tangkapan hasil perikanan.
Potensi dan strategi pengembangan industri pengolahan ikan di PPN Karanguntu : Upaya meningkatkan aktifitas ke pelabuhan perikanan (Hamzah, 2015)	Mengetahui potensi unggulan dan mendapatkan alternatif produksi hasil tangkapan untuk mendukung industri pengolahan serta mendapatkan strategi pengembangan industri pengolahan	Kualitatif dan Kuantitatif menggunakan analisis SWOT	Potensi unggulan ikan adalah ikan teri, kuniran, tetengkek, ekor kuning, pepetek, layang, tongkol, lemuru dan kuro. Alternatif produksi perikanan adalah melalui PPI di sekitar PPN. Strategi pengembangannya adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan industri pengolahan ikan, pengadaan zona industri dan peningkatan kerja sama antar instansi.
Kajian pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati (Riyanto, 2017)	Mengkaji pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati	Kuantitatif dan kualitatif menggunakan analisis faktor, deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif	Arahan pengembangan industri pengolahan perikanan mengacu kepada faktor yang signifikan mempengaruhi pengembangan industri pengolahan perikanan disesuaikan dengan karakteristik industri dan kemkitraan. Faktor tersebut yaitu faktor bahan baku, lokasi industri dan kelembagaan. strategi pengembangannya adalah peningkatan sistim rantai dingin melalui peningkaatn sarana prasarana mulai dari hulu sampai hilir perikanan, pengembangan industri pengolahan perikanan terintegrasi dengan bahan baku di kawasan minapolitan dan peningkatan kemitraan melalui penguatan kelembagaan.

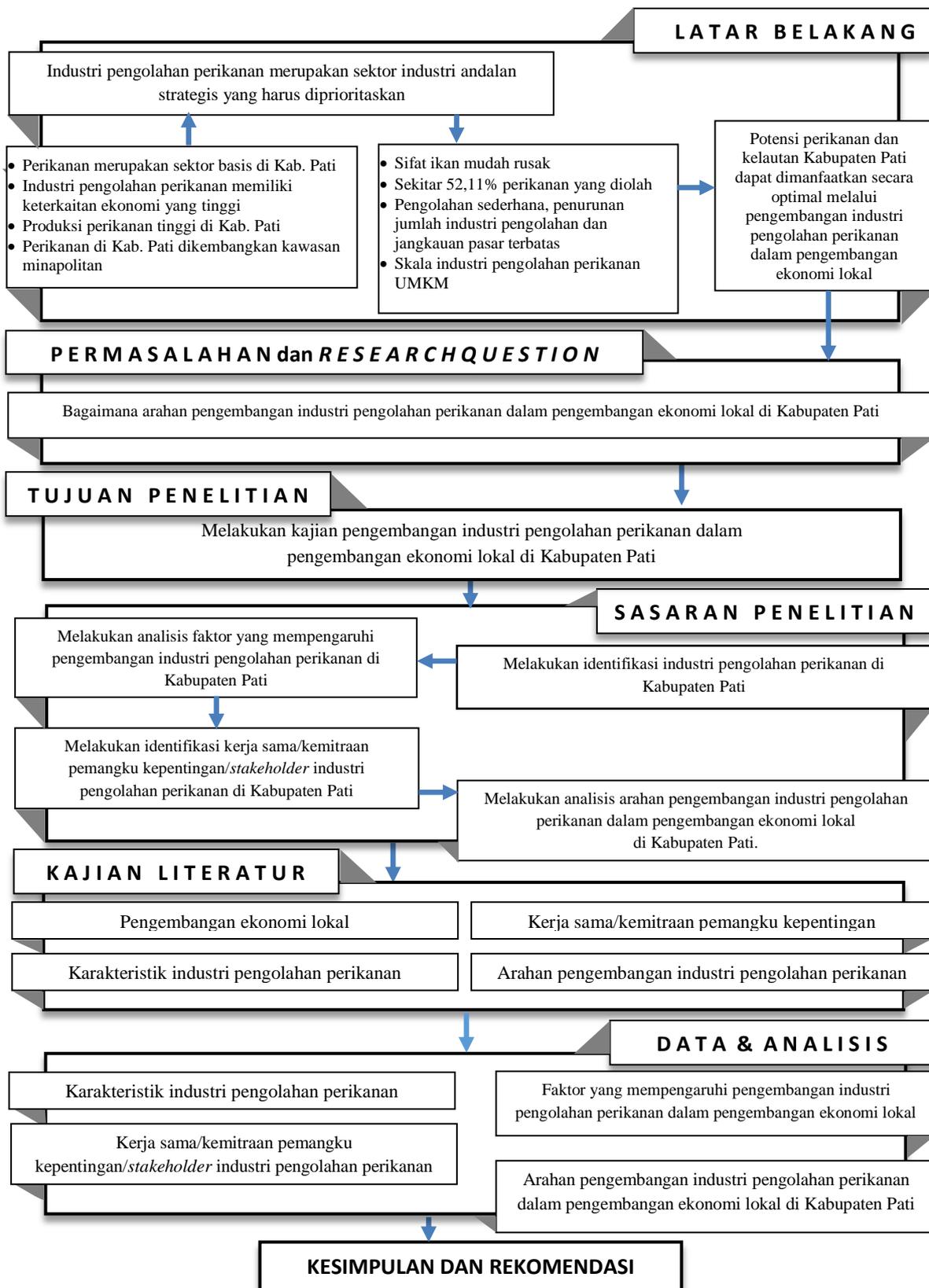
Sumber : Analisis Penyusun, 2017

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian mengenai Kajian Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pati dilatar belakangi adanya ketersediaan bahan baku yang melimpah dan potensi pendukung lainnya di bidang perikanan. Namun, kuantitas unit industri pengolahan perikanan cenderung stagnan karena memiliki jangkauan pasar yang terbatas bahkan mengalami penurunan kuantitasnya. Produk perikanan dan kelautan banyak dijual dalam bentuk mentah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja melalui peningkatan nilai tambah produk perikanan dan kelautan melalui industri pengolahan perikanan. Industri pengolahan perikanan memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap sektor hulu maupun hilir perikanan, sehingga sektor ini merupakan sektor strategis yang harus dikembangkan.

Penentuan alternatif strategi sebagai arahan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal dilakukan melalui analisis faktor, identifikasi karakteristik industri pengolahan perikanan dan identifikasi kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. Alternatif strategi dirumuskan berdasarkan faktor signifikan yang mempengaruhi industri pengolahan perikanan yang disesuaikan dengan temuan fakta mengenai katakteristik industri dan kemitraan industri pengolahan perikanan. Temuan fakta tersebut kemudian dilakukan konfirmasi kepada pemangku kepentingan untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. Selanjutnya penelitian ini akan menghasilkan output berupa kesimpulan dan rekomendasi terkait pengembangan industri pengolahan perikanan. Skema kerangka pemikiran dalam penelitian mengenai kajian pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Sumber : Analisis Penyusun, 2017

GAMBAR 1.3
DIAGRAM KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

1.8. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian metode yang digunakan dalam pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data agar diperoleh penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan positivistik. Pendekatan positivistik merupakan pendekatan dimana setiap orang yang melakukan penelitian mencoba menganalisa fakta-fakta dan data empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi/menyebabkan terjadinya sesuatu hal (Narbuko dan Achmadi, 2007). Pendekatan penelitian ini adalah berpikir positivistik yang berarti berpikir secara spesifik dan berpikir tentang empirik melalui pengamatan yang terukur. Dalam hal ini menganalisa fakta dan data empiris yang ditemukan di lokasi penelitian terkait dengan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati.

1.8.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi (*mixed methods*). Metode penelitian kombinasi menurut Creswel (2014) adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kedua metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan secara sequensial/berurutan dalam suatu penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif (Sugiyono, 2015). Penelitian kualitatif yang dilakukan sebagai bentuk konfirmasi terhadap temuan fakta pada penelitian kuantitatif sehingga didapatkan data yang lebih mendalam. Hasil dari penelitian kuantitatif dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian kualitatif guna merumuskan alternatif strategi pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati.

Metode kuantitatif yang digunakan adalah analisis faktor dan deskriptif kuantitatif. Analisis faktor merupakan analisis statistika yang bertujuan untuk mereduksi dimensi data dengan cara menyatakan variabel awal sebagai kombinasi linear sejumlah faktor, sedemikian hingga sejumlah faktor tersebut mampu

menjelaskan sebesar mungkin keragaman data yang dijelaskan oleh variabel awal (Gozhali, 2005). Metode analisis faktor ini digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati. Metode deskriptif kuantitatif yaitu metode didasarkan pada angka-angka yang ditemukan di lapangan yang ditabulasikan ke dalam bentuk statistik/distribusi frekuensi dan dianalisa secara deskriptif kuantitatif. Dengan metode ini diharapkan mampu mendeskripsikan karakteristik industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati.

Metode kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu didasarkan pada kondisi empirik yang ditemukan di lapangan. Dengan metode ini, diharapkan tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu mampu mendeskripsikan kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati dan arahan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati.

1.8.3. Kebutuhan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa hasil wawancara, opini subjek, secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu objek/kegiatan dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peneliti/pihak lain berupa bukti, catatan, dokumen atau laporan.

1.8.3.1. Kebutuhan Data Primer

Adapun kebutuhan primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi karakteristik industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati
- Observasi kondisi lapangan terkait dengan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati
- Kuesioner terhadap pengolah perikanan terkait karakteristik industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati
- Wawancara terhadap pengolah perikanan di Kabupaten Pati

- b. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati
Kuesioner pelaku usaha pengolahan perikanan yang menunjukkan persepsi terhadap faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati.
- c. Identifikasi kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati
Observasi dan wawancara terhadap pemangku kepentingan yang terkait dengan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati
- d. Analisis arahan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati
Observasi dan wawancara pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati

1.8.3.2. Kebutuhan Data Sekunder

Adapun kebutuhan data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Laporan instansi teknis, dokumen perencanaan instansi teknis dan laporan penelitian.
- Peraturan perundangan, jurnal, buku-buku, media elektronik dan surat kabar.
- Peta RTRW dan peta penggunaan lahan.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1.8.4.1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

- Observasi lokasi terkait dengan aktivitas industri pengolahan perikanan di wilayah studi.
- Wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan instansi teknis, pengolah perikanan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati.
- Penyebaran kuesioner kepada pelaku pengolah perikanan di Kabupaten Pati

1.8.4.2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan cara:

- Telaah laporan instansi teknis, dokumen perencanaan instansi teknis dan laporan penelitian.
- Telaah peraturan perundangan dan peraturan teknis, jurnal, buku-buku, media elektronik dan surat kabar
- Telaah peta RTRW dan peta penggunaan lahan Kabupaten Pati

1.8.5. Teknik Pengolahan Data

Hasil pengumpulan data primer dan sekunder yang didapatkan kemudian dilakukan pengolahan data. Rencana pengolahan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyuntingan data (*editing*), merupakan tahap memeriksa kembali kualitas data primer maupun sekunder.
2. Melakukan pengkodean data (*coding*), hasil wawancara dengan teknik *verbatim* dilakukan pengkodean data yaitu proses pengklasifikasian tanggapan atau jawaban menjadi kategori yang lebih bermakna. Mengkode berarti memberi angka pada tiap kategori jawaban sehingga tiap jawaban yang telah disusun dalam suatu kategori tertentu memiliki kode tersendiri berupa angka.
3. Melakukan tabulasi data, hasil data wawancara maupun kuisisioner yang bersifat kuantitatif selanjutnya dilakukan tabulasi data dalam bentuk distribusi statistik maupun peta. Selanjutnya dilakukan analisis deskripsi kuantitatif berdasarkan kajian literatur.
4. Melakukan pengolahan data, data hasil penelitian dilakukan analisa menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

1.8.6. Metode Pengambilan Sampel

Suatu penelitian memerlukan data, dimana pengambilannya berdasarkan metode teknik pengambilan sampel tertentu dari suatu populasi. Populasi merupakan keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti. Sementara, sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu, sampel harus

dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi. Sesuai dengan metode penelitian yang menggunakan metode kombinasi maka pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan melalui dua teknik.

Penelitian kuantitatif untuk mencapai sasaran penelitian identifikasi karakteristik industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati dan analisis faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati menggunakan teknik pengambilan sampel *probability sampling*. Responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah pelaku usaha industri pengolahan perikanan yang ada di Kabupaten Pati. Sedangkan penelitian kualitatif untuk mencapai sasaran identifikasi kerja sama pemangku kepentingan dan arahan pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probability sampling*. Sampel dari penelitian ini adalah pemangku kepentingan yang terlibat di dalam industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati.

1.8.6.1. Teknik Probability Sampling

Teknik pengambilan sampel *probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Dimana teknik ini digunakan dalam sasaran penelitian analisis faktor dan identifikasi industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. Jumlah minimal sampel yang diambil berdasarkan perhitungan adalah 88 sampel. Namun dalam penelitian ini jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 sampel sebagai responden proporsional baik secara wilayah maupun proses pengolahan perikanan. Responden tersebut terdiri dari pelaku usaha pengolahan perikanan di wilayah studi yang berjumlah 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) unit pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. Acuan jumlah sampel yang dijadikan responden dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{778}{1 + 778(0,1^2)}$$

$$n = 88,61$$

Dimana :

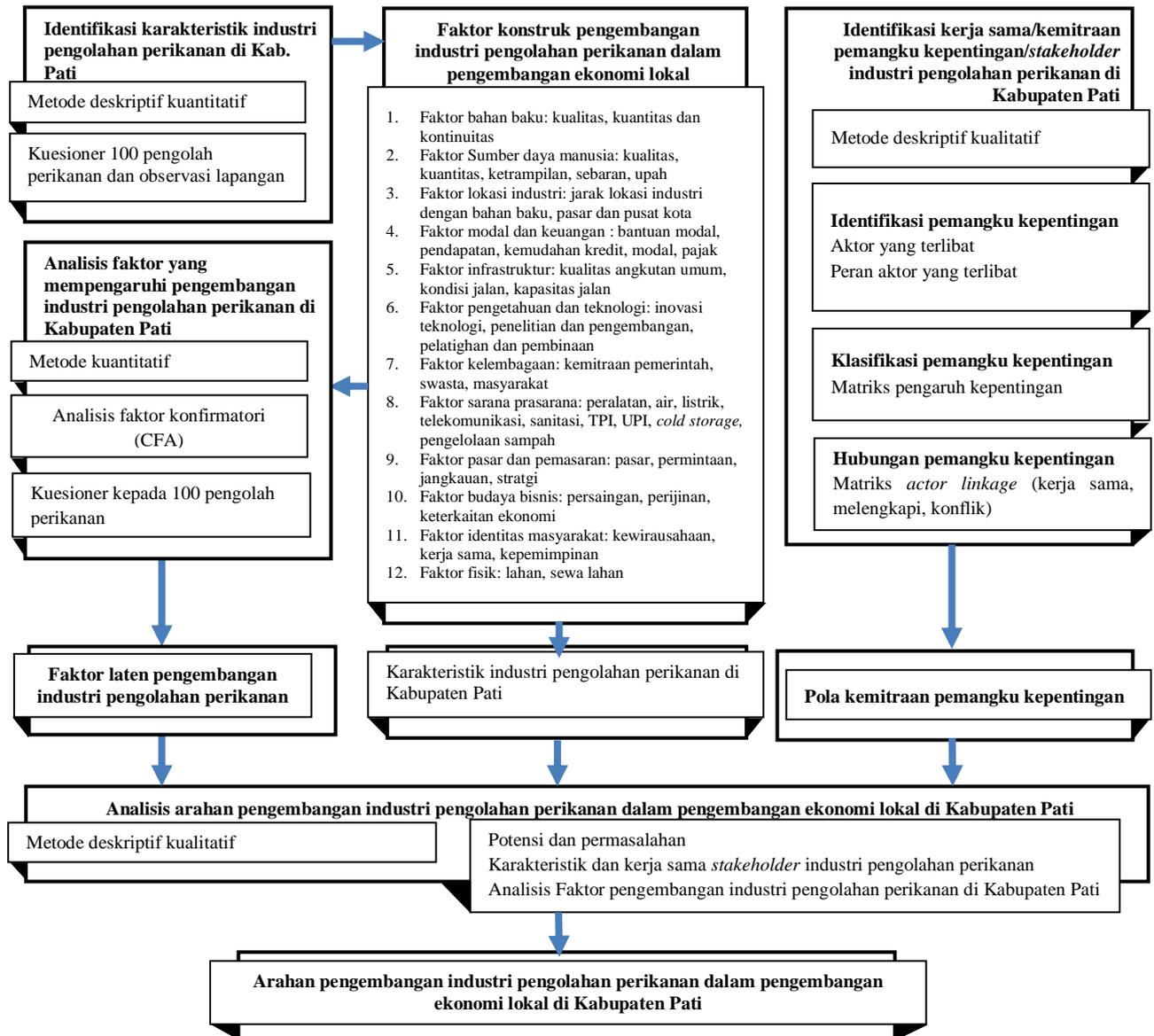
n	=	Ukuran sampel
N	=	Ukuran populasi
e	=	Tingkat ketelitian/kepercayaan 10%

1.8.6.2. Teknik Non-Probability Sampling

Pada teknik *non-probability sampling*, sampel yang diambil dilakukan secara *purposive sampling*. Narasumber tersebut merupakan informan kunci dari pemangku kepentingan yang terlibat didalam industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. Pemangku kepentingan tersebut meliputi instansi teknis (Bappeda, Dislautkan, Disdagperin, Dinkop dan UMKM, DPUTR, DLH, Dispermades, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa dan DPMPTSP), penyuluh perikanan, penyuluh UMKM/BDS-P, ketua kelompok pengolah perikanan, perusahaan serta beberapa orang pelaku utama dan pelaku usaha pengolahan perikanan di wilayah studi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih dalam sehingga mampu menjawab tujuan dari penelitian.

1.8.7. Kerangka Analisis

Kerangka analisis menggambarkan mengenai keseluruhan komponen dari tahapan yang akan dilakukan dalam proses analisis data. Kerangka analisis menunjukkan susunan sistematis, mulai dari data yang dibutuhkan, jenis analisis, metode yang digunakan, instrumen analisis, output serta hasil akhir dari semua analisis yang telah dilakukan. Kerangka analisis terdiri dari 4 (empat) tahapan sesuai dengan sasaran dari penelitian guna menjawab tujuan penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.4.



Sumber : Analisis Penyusun, 2017

GAMBAR 1.4
DIAGRAM KERANGKA ANALISIS PENELITIAN

1.8.8. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan penggunaan masing-masing sebagai berikut:

1.8.8.1. Teknik Analisis Kuantitatif

Teknik yang digunakan adalah analisis faktor konfirmatori (CFA) dan deskriptif kuantitatif yang bersifat numerik yaitu data-data tabulasi statistik distribusi yang disesuaikan dengan sasaran penelitian sebagai berikut:

1. Identifikasi karakteristik industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif mengenai karakteristik industri pengolahan perikanan yang ada di Kabupaten Pati. Karakteristik tersebut meliputi variabel bahan baku, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, lokasi, sarana prasarana, kelembagaan, infrastruktur, permodalan dan keuangan, budaya bisnis, identitas masyarakat, faktor fisik, pasar dan pemasaran. Hasil pengolahan data ditabulasikan secara distribusi statistik dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

2. Analisis faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis faktor. Analisis faktor adalah analisis yang digunakan untuk menentukan variabel atau yang disebut dengan faktor yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya variabel aslinya dimana faktor tersebut tidak berkorelasi satu dengan yang lain (multikolinieritas) (Suryanto, 1998). Analisis faktor dilakukan dalam rangka mengekstraksi/mereduksi *unobservable* variabel atau variabel yang tidak bisa diukur secara langsung menjadi variabel baru yang disepakati bersama (variabel laten), mempermudah interpretasi hasil analisis, melakukan uji validitas dan realibilitas instrumen yang digunakan. Terdapat dua metode analisis faktor, yaitu analisis faktor eksploratori (*eksploratory factor analysis*) dan analisis faktor konfirmatori (*confirmatori factor analysis*). Analisis faktor eksploratori merupakan analisis faktor yang dilakukan melalui eksplorasi dari indikator atau variabel yang nantinya akan terbentuk faktor yang akan dilakukan interpretasi dan didapatkan variabel latennya. Analisis faktor yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis *Confirmatory Faktor Analysis (CFA)*, dimana analisis ini menguji seluruh varian dalam variabel observasi yang dibentuk serta

variabel latennya berlandaskan teori dan konsep dan bertujuan untuk menyederhanakan variabel tersebut dan memeriksa validitas dan realibilitasnya.

Pada prinsipnya analisis ini melakukan konfirmasi berdasarkan teori atau konsep yang sudah ada terhadap keakuratan (valid dan reliabel) instrumen yang kita buat. Realibilitas merupakan tingkat kepercayaan terhadap instrumen kuesioner. Sementara validitas/kesahihan artinya sejauh mana informasi yang diperoleh dari pengukuran dapat diinterpretasikan sebagai capaian atau karakteristik yang diukur (Sugiyono, 2015). Pengolahan data analisis ini menggunakan software IBM SPSS Statistik 23. Adapun teknik analisisnya sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian realibilitas sebelum dilakukan analisis berikutnya menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Dimana instrumen dikatakan *reliable* apabila nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 (Nunnally (1970) dalam Yusrizal (2008)).
2. Melakukan pengujian validitas variabel yang dibentuk sebelum menuju analisis selanjutnya, variabel dikatakan valid apabila nilai signifikansi korelasi kurang dari 5% (lima persen), $sign < 0,05$. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan hubungan korelasi antar variabel.
3. Melakukan analisis keterkaitan antar variabel dengan uji KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy*) dan *Bartlett of sphericity*, nilai KMO $> 50\%$ (KMO lebih dari 0,5) artinya terdapat keterkaitan antar variabel. Apabila terdapat variabel memiliki nilai KMO $< 0,5$ maka variabel tersebut harus direduksi dan dilakukan analisis kembali sampai semua variabel memiliki KMO $> 0,5$.
4. Melakukan analisis MSA (*Measures of Sampling Adequacy*) untuk melihat variabel layak digunakan analisis atau tidak, variabel yang layak memiliki nilai MSA $> 50\%$ (MSA lebih dari 0,5). Apabila nilai MSA kurang dari 0,5 maka variabel tersebut harus direduksi dan dilakukan analisis kembali sampai semua variabel memiliki nilai MSA lebih dari 0,5.
5. Melakukan analisis *Component Matrix/Factor Loading*, dalam analisis ini semua variabel yang dianalisis harus berada pada satu faktor (terbentuk dalam satu komponen). Apabila tidak terbentuk dalam satu komponen maka

dilakukan pengulangan analisis dengan mereduksi variabel yang memiliki MSA paling kecil sampai terbentuk satu faktor (terbentuk dalam satu komponen).

1.8.8.2. Teknik Analisis Kualitatif

Teknik analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana menurut Afrizal (2016) untuk menganalisis untuk data kualitatif terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- Tahap pertama, menyediakan catatan lapangan secara detail dan lengkap hasil wawancara mendalam atau observasi, verbatim atau dokumen. Seluruh dokumen dilakukan review secara menyeluruh agar mendapatkan kesan dan isi keseluruhan dokumen hasil penelitian. Kemudian data dan informasi yang diperoleh dipelajari secara teliti untuk mendapatkan kata penting, simbol, argumen atau kejadian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan atau ditemukan hal-hal yang secara berulang muncul dalam perbincangan. Proses dilanjutkan dengan memberikan tanda atau kode terhadap informasi penting yang didapatkan. Kodifikasi dapat dilakukan melalui model sebagai berikut: **(A,W-2,10-10-2017,65-70)**, dimana:

A : inisial atau singkatan nama subjek penelitian

W-2 : wawancara ke-2

10-10-2017 : tanggal wawancara dilakukan

65-70 : lokasi baris dalam verbatim (baris ke 65 hingga 70)

- Tahap kedua, menginterpretasikan hal-hal yang diperoleh dilapangan dan telah dilakukan proses simbolisasi. Kemudian dilakukan klasifikasi secara berkesinambungan terhadap hasil interpretasi seluruh data.
- Tahap ketiga, setelah menemukan temuan yang relevan dalam penelitian dilapangan dilanjutkan ke tahapan penyajian data dan menghubungkan antar klasifikasi interpretasi data.
- Tahap keempat, setelah dilakukan simbolisasi, akumulasi, interpretasi data peneliti membangun asumsi atau hipotesis kerja mengenai fenomena penelitian.

- Tahap kelima, melakukan uji validasi data kualitatif melalui pemeriksaan akurasi hasil penelitian baik dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca umum. Uji validasi ini dilakukan secara siklus dan memungkinkan terjadinya pengulangan, misalnya setelah tahap kelima peneliti dapat kembali melakukan interpretasi ke tahap kedua untuk membangun hipotesis hingga data yang diperoleh valid untuk menjawab tujuan dan pertanyaan penelitian.

Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk menjawab sasaran penelitian sebagai berikut:

1. Identifikasi kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati.

Tahap analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisis pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan dilakukan untuk menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan. Pengaruh adalah kekuatan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan terhadap pengembangan industri pengolahan perikanan, sementara kepentingan merupakan prioritas yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dari setiap pemangku kepentingan. Teknik analisis pemangku kepentingan dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu identifikasi pemangku kepentingan, melakukan klasifikasi pemangku kepentingan dan mengidentifikasi hubungan antar pemangku kepentingan (Reed *et al.*, 2009). Kemudian dilakukan identifikasi kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan.

1.1. Identifikasi pemangku kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan untuk mengetahui aktor yang terlibat dalam pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah instansi pemerintah, kelompok swasta dan masyarakat. Identifikasi dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak yang terkait. Menurut Crosby (1991) pemangku kepentingan dapat dikelompokkan pemangku kepentingan kunci, utama dan pendukung.

1.2. Mengelompokkan/klasifikasi pemangku kepentingan

Setelah pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan industri pengolahan perikanan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian pemangku kepentingan dengan mengelompokkan dan membedakan antar pemangku kepentingan. Menurut Eden dan Ackerman (1998) dalam Reed *et al.*, (2009) klasifikasi pemangku kepentingan dianalisis menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan dan membagi kedalam empat kelompok, yaitu *key player*, *context setter*, *subject* dan *crowd*. *Key player* merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi, *context setter* memiliki kepentingan rendah tetapi pengaruhnya tinggi, *subject* memiliki pengaruh yang tinggi namun kepentingannya rendah dan *crowd* merupakan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah.

TABEL I.2
UKURAN KUANTITATIF KEPENTINGAN DAN PENGARUH
PEMANGKU KEPENTINGAN

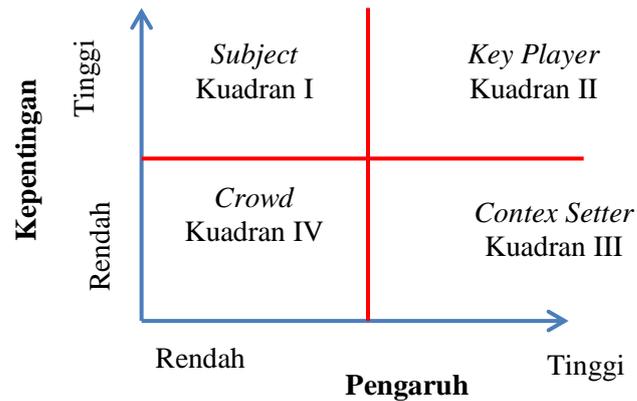
Skor	Nilai	Kriteria	Keterangan
Keperntingan pemangku keperntingan			
5	21-25	Sangat tinggi	Sangat menentukan pengembangan
4	16-20	Tinggi	Mendukung pengembangan
3	11-15	Cukup tinggi	Cukup mendukung pengembangan
2	6-10	Kurang tinggi	Kurang mendukung pengembangan
1	0-5	Rendah	Tidak mendukung pengembangan
Pengaruh pemangku keperntingan			
5	21-25	Sangat tinggi	Sangat mempengaruhi pengembangan
4	16-20	Tinggi	Mempengaruhi pengembangan
3	11-15	Cukup tinggi	Cukup mempengaruhi pengembangan
2	6-10	Kurang tinggi	Kurang mempengaruhi pengembangan
1	0-5	Rendah	Tidak mempengaruhi pengembangan

Sumber : Abbas, 2005

Pengelompokan pemangku kepentingan menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan yang dilakukan melalui skoring berdasarkan pada data yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara terhadap informan kunci yang mewakili pemangku kepentingan. Menurut Abbas (2005) penetapan skoring menggunakan pertanyaan untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan yaitu pengukuran berjenjang tingkat lima seperti yang ditunjukkan pada Tabel I.2. Nilai dari skor pertanyaan dijumlahkan dan nilainya dipetakan dalam bentuk matriks kepentingan dan pengaruh.

Kepentingan merupakan kebutuhan yang diperlukan pemangku kepentingan didalam pencapaian output dan tujuan (Reed *et al.*, 2009). Pengukuran tingkat kepentingan pemangku kepentingan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan menggunakan lima variabel, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembuatan regulasi, fungsi produksi, penyedia lokasi/*habitat*, *carrier*/ fungsi pembawa produk dan fungsi informasi (de Groot *et al.*, 2006 dalam Reed *et al.*, 2009). Sementara, pengukuran tingkat pengaruh dalam pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati menggunakan lima variabel yang menggambarkan kepada kekuatan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu keputusan. Variabel kekuatan tersebut meliputi kekuatan kompensasi, kekuatan individu, kekuatan kondisi, kekuatan kelayakan dan kekuatan organisasi (Galbraith 1983 dalam Reed *et al.*, 2009).

Jumlah skor maksimal yang didapatkan dari masing-masing pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan adalah 25 (dua puluh lima) sesuai dengan tabel I.2. Hasil penetapan skor dikelompokkan menurut jenis indikator dan ditampilkan dalam koordinat yang terbagi menjadi empat kuadran. Dimana sumbu horizontal menunjukkan tingkat pengaruh pemangku kepentingan dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat kepentingan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan. Adapun matrik tingkat pengaruh-kepentingan pemangku kepentingan seperti yang diilustrasikan pada gambar 1.5 .



Sumber : Bryson, 2004

GAMBAR 1.5
MATRIK PENGARUH DAN KEPENTINGAN

1.3. Menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengembangan industri pengolahan di Kabupaten Pati.

Hubungan antar pemangku kepentingan digambarkan secara deskriptif berdasarkan dokumen dan wawancara. Dokumen yang digunakan adalah tupoksi dan aturan kelembagaan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. Untuk menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan digunakan *metode actor linkage matrices* yang menggunakan matriks berisi para pemangku kepentingan dalam tiap baris dan kolomnya. Hubungan antar pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu hubungan konflik, saling mengisi (komunikasi dan koordinasi) dan kerja sama (Reed *et al.*, 2009).

1.4. Identifikasi kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati

Identifikasi pola kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan berdasarkan pola kemitraan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pola kemitraan lainnya. Dimana salah satu upaya untuk mengembangkan UMKM dilakukan melalui kemitraan.

2. Melakukan analisis arahan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati.

Teknik analisis yang digunakan dalam menyusun arahan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana penyusunan alternatif strategi pengembangan industri pengolahan perikanan berdasarkan potensi dan permasalahan yang didapatkan dari hasil identifikasi karakteristik industri pengolahan perikanan, analisis faktor yang mempengaruhi industri pengolahan perikanan dan karakteristik kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati.

1.9. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, originalitas penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Literatur

Bab kajian literatur menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Literatur yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal, Karakteristik Industri Pengolahan Perikanan, Kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan dan strategi pengembangan. Selanjutnya, kajian literatur disajikan dalam sintesis literatur.

Bab III. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi yaitu Kondisi umum Kabupaten Pati, Penggunaan Lahan, Demografi/Kependudukan, Perekonomian, Perikanan dan Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Pati.

Bab IV. Pembahasan

Bab ini menyajikan pembahasan identifikasi karakteristik industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati, analisis faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati, identifikasi kerja sama/kemitraan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati, dan analisis arahan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati.

Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi terkait dengan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati.